



RENCANA KERJA (RENJA)

2023



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS SOSIAL

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 ini disusun disamping berdasarkan analisis lingkungan strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng juga mempedomani ataupun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPD) Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 serta mempedomani kebijakan Pemerintah yang lebih tinggi.

Renja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng substansinya memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang nantinya menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Renja ini akan menjadi pedoman/acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penyusunan LKjIP serta program dan kegiatan lainnya yang terkait.

Kami selaku Pimpinan SKPD Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menaruh harapan besar agar Renja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam rangka meningkatkan kepedulian dan keterlibatan semua pihak dalam penanggulangan masalah sosial di Kabupaten Buleleng, sehingga masyarakat Buleleng semakin sejahtera.

Dengan telah selesainya penyusunan Renja ini, tidak lupa kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini, semoga apa yang telah diberikan mendapat rahmat/karunia dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, 2022

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,


I Putu Kajiawan Putra, S.Sos, MM
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19691231 199103 1 053

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinsos Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III. TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	28
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD	29
3.3. Program dan Kegiatan	29
BAB IV. PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah serta antar lembaga pemerintah di daerah, maka dalam sistem perencanaan pembangunan berpedoman pada UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi yang saling terkait antara perencanaan ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka diamanatkan bagi daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki dalam upaya pengembangan potensi sumberdaya daerah untuk pembangunan dan pelayanan pada masyarakat

Pembangunan pada dasarnya merupakan implementasi dari suatu perencanaan, baik perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM) maupun yang bersifat perencanaan tahunan (RKP). Berkaitan dengan perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD mengamanatkan Bupati/Walikota mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahannya menyusun Rancangan RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program prioritas yang disampaikan/disosialisasikan pada waktu menjadi Calon Bupati serta paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota harus sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Berkenaan dengan ketentuan dimaksud Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah

(PERDA) Kabupaten Buleleng No.3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah menjadi pedoman penetapan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Berkenaan dengan amanat tersebut Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra yang dituangkan dalam setiap tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik yang dilaksanakan dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Melalui Renja Dinas Sosial akan direncanakan dan ditentukan kemana Dinas Sosial Kabupaten Buleleng akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Dengan demikian dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sangat penting untuk disusun sehingga dapat dipastikan adanya sinergitas dan konsistensi antara rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dengan perencanaan di atasnya serta peraturan perundangan yang berlaku.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja/ Renja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang RI. No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang -Undang RI. No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
3. Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
5. Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden RI. No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
12. Perda Kabupaten Buleleng No.3 Tahun 2013 Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dimaksudkan untuk terwujudnya konsistensi dan integrasi perencanaan pembangunan dalam lingkup Dinas Sosial dan tersedianya pedoman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 serta bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2023.
2. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023 adalah sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJM Daerah, serta dasar/acuan Dinas Sosial untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dari Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematikan Penulisan

Bab. II Hasil Evaluasi Renja Dinas Sosial Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Sosial
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab. III Tujuan, Sasaran Dinas Sosial

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

3.3. Program dan Kegiatan

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial

Bab. IV. P e n u t u p

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang sosial yang dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2021, Secara umum realisasi capaian kinerja dalam tahun 2021 telah mencapai target yang telah di tetapkan.

Pencapaian kinerja tahun 2021 lalu tersebut di dukung melalui pelaksanaan 6 Program, 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Program utama 5 program, 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan jumlah anggaran dari dana belanja langsung sebesar Rp.8.119.283.547,00 dengan realisasi Rp.7.953.559.038,00 atau 97,96%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per sub kegiatan tergambar pada realisasi belanja langsung. Pencapaian target program kegiatan sudah tercapai secara fisik 99.35%, sekalipun realisasi dana mencapai 97,96% hal ini disebabkan karena adanya efisiensi dalam pelaksanaan belanja.

Dari capaian kinerja dalam sub kegiatan, kegiatan, program dan kebijaksanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dapat dikatakan berhasil dan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial yang telah disusun, hal ini bisa dibuktikan dengan pencapaian target kegiatan dan target sasaran sebesar 97,96% (Belanja Langsung). Pelaksanaan program ini tercapai tentunya berkat dukungan dan koordinasi dari Dinas/Instansi terkait, partisipasi aktif dari masyarakat, para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT) yang ada di masing masing Desa serta Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada di masing-masing Kecamatan, Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Buleleng, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Buleleng.

Adapun Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2023 Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Buleleng

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4	
	Urusan Wajib Sosial										
	Dinas Sosial										
1	01 06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	01 06 01 01 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jumlah surat terkirim	-	2.000 Eksemplar	-	-	-	-	2.000 Eksemplar	1,00
1	01 06 01 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya operasional kantor	-	132 Rekening	-	-	-	-	132 Rekening	1,00
1	01 06 01 01 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase jumlah jenis kendaraan dinas	-	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	1,00
1	01 06 01 01 006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara izinnya	-	33 Unit	-	-	-	-	33 Unit	1,00
1	01 06 01 01 007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase jumlah jenis laporan keuangan	-	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	1,00
1	01 06 01 01 008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase jumlah lingkungan kantor terpelihara	-	28 unit, 7 Orang	-	-	-	-	28 unit, 7 Orang	1,00
1	01 06 01 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase jumlah alat tulis kantor yang tersedia	-	52 Unit	-	-	-	-	52 Unit	1,00
1	01 06 01 01 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase jumlah tersedianya barang cetakan dan penggandaan	-	12 Unit	-	-	-	-	12 Unit	1,00
1	01 06 01 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase jumlah dan jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	-	12 Unit	-	-	-	-	12 Unit	1,00
1	01 06 01 01 013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
1	01 06 01 01 015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase jumlah bahan-bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	-	12 Unit	-	-	-	-	12 Unit	1,00
1	01 06 01 01 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase jumlah makanan dan minuman yang tersedia	-	12 Unit	-	-	-	-	12 Unit	1,00
1	01 06 01 01 018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Persentase jumlah kali koordinasi dilaksanakan	-	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	1,00
1	01 06 01 01 022	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Persentase jumlah dan tercatatnya administrasi kepegawaian lingkup SKPD	-	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	1,00
1	01 06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
-1	01 06 01 02 005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-
0	01 06 01 02 007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	-	-	-	-	-	-	-	-
1	01 06 01 02 009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	-	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	1,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
2	01 06 01 02 010	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor yang memadai	-	-	-	-	-	-	-
1	01 06 01 02 012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Persentase jumlah kali terselenggaranya upacara keagamaan	-	21 Unit	-	-	-	21 Unit	1,00
1	01 06 01 02 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya tempat kerja yang nyaman	-	1 Tahun	-	-	-	1 Tahun	1,00
1	01 06 01 02 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	-	13 unit	-	-	-	13 unit	1,00
1	01 06 01 02 028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	-	29 Unit	-	-	-	29 Unit	1,00
1	01 06 01 02 054	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Persentase jumlah kegiatan lomba yang diikuti	-	6 Unit	-	-	-	6 Unit	1,00
1	01 06 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
1	01 06 01 03 002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatnya Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	-	-
1	01 06 01 03 003	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Meningkatnya Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	-	-
1	01 06 01 03 004	Pengadaan Pakaian KORPRI	Meningkatnya Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	-	-
1	01 06 01 03 005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Meningkatnya Disiplin Pegawai	-	-	-	-	-	-	-
1	01 06 01 03 006	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan iman pegawai	-	-	-	-	-	-	-
1	01 06 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1	01 06 01 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	7 Jenis Laporan	-	-	-	7 Jenis Laporan	1,00
1	01 06 01 07	Program Perencanaan Anggaran SKPD								
1	01 06 01 07 001	Penyusunan Anggaran SKPD	Tersedianya dokumen rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, Tersedianya Buku Profil Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	-	8 Jenis Dokumen	-	-	-	8 Jenis Dokumen	1,00
1	01 06 01 08	Program Informasi Pembangunan Daerah								
1	01 06 01 08 001	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Tersebar nya informasi pameran pembangunan, meningkatnya pemahaman masyarakat, tentang program dinas social melalui pameran pembangunan	-	-	-	-	-	-	-
1	01 06 01 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya								
1	01 06 01 15 001	Peningkatan Kemampuan Petugas dan pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial	-	148 Desa/Kelurahan, 500 Orang	-	-	-	148 Desa/Kelurahan, 500 Orang	1,00
1	01 06 01 15 002	Pelatihan keterampilan berusaha bagi Keluarga Miskin	Meningkatnya jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE	-	6 KUBE	-	-	-	6 KUBE	1,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4	
1	01 06 01 15 005	Pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP	-	4 KUBE	-	-	-	-	4 KUBE	1,00
1	01 06 01 15 007	Pemutakhiran data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Jumlah data penduduk miskin dan PMKS yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	-
1	01 06 01 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial									
1	01 06 01 16 002	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi perempuan dan anak	-	0 Orang	-	-	-	-	0 Orang	1,00
1	01 06 01 16 003	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang PMKS	-	0 Orang	-	-	-	-	0 Orang	1,00
1	01 06 01 16 004	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Meningkatnya keterampilan anak terlantar, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas dan anak nakal	-	-	-	-	-	-	-	-
1	01 06 01 16 010	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Meningkatnya kewaspadaan terhadap masalah-masalah strategis dan tertanganinya masalah strategis tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	-	-	-	-	-	-	-	-
1	01 06 01 16 012	Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti	Meningkatnya harapan hidup lanjut usia	-	320 Orang	-	-	-	-	320 Orang	1,00
1	01 06 01 16 014	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak nakal	Meningkatnya keterampilan anak terlantar, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas dan anak nakal	-	0 Anak	-	-	-	-	0 Anak	1,00
1	01 06 01 17	Program Pembinaan Anak Terlantar									
1	01 06 01 17 002	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Meningkatnya keterampilan, terpenuhinya bantuan sembako bagi Anak Terlantar	-	135 Anak	-	-	-	-	135 Anak	1,00
1	01 06 01 17 003	Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar	Tersedianya data dan analisis permasalahan anak terlantar	-	-	-	-	-	-	-	-
1	01 06 01 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma									
1	01 06 01 18 003	Pendidikan dan Pelatihan bagi Para Penyandang Cacat dan eks Trauma	Meningkatnya kemandirian penyandang cacat dan eks trauma	-	-	-	-	-	-	-	-
1	01 06 01 18 004	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma	Meningkatnya peran penyandang cacat dan eks trauma	-	-	-	-	-	-	-	-
1	01 06 01 19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo									
1	01 06 01 19 004	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Meningkatnya penghuni Panti yang memdapat pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-
1	01 06 01 19 005	Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik	Meningkatnya kualitas tenaga pengelola/pendidik Panti dalam bidang pengelolaan, meningkatnya keterampilan anak asuh	-	-	-	-	-	-	-	-
1	01 06 01 19 007	Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni Panti Asuhan/Jompo	Meningkatnya Kesejahteraan Penghuni Panti Asuhan	-	4 Panti Asuhan	-	-	-	-	4 Panti Asuhan	1,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
1	01 06 01 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)								
1	01 06 01 20 001	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Meningkatnya keterampilan eks napi	-	0 Orang	-	-	-	0 Orang	1,00
1	01 06 01 20 004	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Meningkatnya keberdayaan eks penyandang penyakit sosial	-	135 Orang	-	-	-	135 Orang	1,00
1	01 06 01 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								
1	01 06 01 21 001	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	- Meningkatnya pemahaman tentang PMKS dan PSKS, UGB, PUB - Meningkatnya pemahaman kesejahteraan keluarga	-	0 Orang	-	-	-	0 Orang	1,00
1	01 06 01 21 002	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat .	Meningkatnya jejaring kerjasama dengan Karang Taruna di bidang usaha kesejahteraan sosial	-	0 Karang Taruna	-	-	-	0 Karang Taruna	1,00
1	01 06 01 21 003	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya SDM Karang Taruna ,PSM dan TKSK di bidang usaha dan Kesejahteraan Sosial	-	0 Karang Taruna, 0 PSM dan 0 TKSK	-	-	-	0 Karang Taruna, 0 PSM dan 0 TKSK	1,00
1	01 06 01 21 004	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Meningkatnya perlindungan kesosialan	-	-	-	-	-	-	-
1	01 06 01 22	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial								
1	01 06 01 22 001	Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Meningkatnya pemahaman kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	-	3 Kegiatan	-	-	-	3 Kegiatan	1,00
1	01 06 01 22 002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen / Tugu Perjuangan	Meningkatnya fungsi Taman Makam Pahlawan (TMP) Curastana dan Monumen/Tugu Perjuangan	-	1 TMP, 5 Monumen	-	-	-	1 TMP, 5 Monumen	1,00
1	01 06 01 22 004	Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	Meningkatnya Fungsi Monumen dan Tugu Perjuangan	-	5 Monumen/Tugu Perjuangan	-	-	-	5 Monumen/Tugu Perjuangan	1,00
1	01 06 01 24	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial								
1	01 06 01 24 001	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Meningkatnya kewaspadaan terhadap masalah-masalah strategis dan tertanganinya masalah strategis tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	-	2.375 KK dan 5 Orang	-	-	-	2.375 KK dan 5 Orang	1,00
1	01 06 01 24 002	Pemutakhiran data penduduk miskin (PMKS) dan PSKS Lainnya	Terverifikasinya data penduduk miskin dan PMKS	-	148 Desa/ kelurahan	-	-	-	148 Desa/ kelurahan	1,00
1	01 06 01 24 003	Pengembangan model kelembagaan perlindungan jaminan sosial	Meningkatnya perlindungan kesosialan	-	1 Lembaga	-	-	-	1 Lembaga	1,00
1	01 06 01 25	Program Pembinaan Para Penyandang disabilitas dan Trauma								
1	01 06 01 25 001	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma	Meningkatnya kemandirian penyandang disabilitas dan eks trauma	-	0 Orang	-	-	-	0 Orang	1,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
1.01.06.01.25.002	Pendayagunaan para penyandang disabilitas dan eks trauma	Meningkatnya peran penyandang disabilitas dan eks trauma	-	360 Orang	-	-	-	-	360 Orang	1,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran sesuai target, Persentase perencanaan anggaran skpd yang sesuai renstra	100 %	-	100 %	100 %	1,00	100 %	100 %	1,00
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	8 Jenis Dokumen	-	8 Jenis Dokumen	8 Jenis Dokumen	1,00	8 Dokumen	8 Dokumen	1,00
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran dan jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Sosial	7 Laporan	-	7 Laporan	7 Laporan	1,00	7 Dokumen / Laporan	7 Dokumen / Laporan	1,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	-	100 %	100 %	1,00	100 %	100 %	1,00
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	12 Laporan	-	-	-	1,00	12 Laporan	12 Laporan	1,00
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen kepegawaian	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	1,00	12 Laporan	12 Laporan	1,00
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	1,00	12 Laporan	12 Laporan	1,00
1.06.01.2.05	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	-	100 %	100 %	1,00			
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya, 2. Jumlah pakaian kerja lapangan, 3. Jumlah pakaian korpri, 4. Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	111 Stel	-	81 Stel	81 Stel	0,73			
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase pelaksanaan pameran pembangunan	100 %	-	100 %	100 %	1,00	100%	100%	1,00
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	1,00	8 Unit	8 Unit	1,00
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	30 Unit	-	30 Unit	30 Unit	1,00	10 Unit	10 Unit	1,00
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman, Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	12 Bulan/ 1 Tahun/1 LS/1 Kali	-	12 Bulan/ 1 Tahun/ 1 LS/ 1 Kali	12 Bulan/ 1 Tahun/ 1 LS/ 1 Kali	1,00	20 Unit, 40 Unit	20 Unit, 40 Unit	1,00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	1,00	22 Buah, 67.865 Lembar	22 Buah, 67.865 Lembar	1,00
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 Jenis / 12 Bulan	-	6 Jenis / 12 Bulan	6 Jenis / 12 Bulan	1,00	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	1,00	12 Laporan	12 Laporan	1,00
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	-	100 %	100 %	1,00	0	0	
1 06 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	3 Unit	-	2 Unit	2 Unit	0,67	-	-	
1 06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	3 Jenis	-	3 Jenis	3 Jenis	1,00	-	-	
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	3 Jenis	-	3 Jenis	3 Jenis	1,00	-	-	
1 06 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 Unit	-	4 Unit	4 Unit	1,00	-	-	
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	-	100 %	100 %	1,00	100 %	100 %	1,00
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk / keluar	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	1,00	2000 Eksemplar	2000 Eksemplar	1,00
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, telpon dan listrik	132 Rekening/12 Bulan	-	132 Rekening / 12 Bulan	132 Rekening / 12 Bulan	1,00	132 Rekening	132 Rekening	1,00
1 06 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kendaraan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	1,00	2 Unit	2 Unit	1,00
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan, jumlah alat tulis kantor, jumlah tenaga kebersihan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	1,00	12 Unit, 12 Unit	12 Unit, 12 Unit	1,00
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	-	100 %	100 %	1,00	100 %	100 %	1,00
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah perijinan kendaraan dinas operasional	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	1,00	25 Unit, 30 Unit	25 Unit, 30 Unit	1,00
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	1,00	12 Unit	12 Unit	1,00
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	1,00	1 Paket	1 Paket	1,00
1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial							14.50 %	14.50 %	1,00
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, Persentase panti asuhan yang mendapat pembinaan, persentase psks yang aktif dalam pemberdayaan kelembagaan sosial, persentase pmks yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	5,3 %	-	5,3 %	5,3 %	1,00	14.5 %	14.5 %	1,00
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan UEP, Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, jumlah PMKS penerima sembako	148 Desa / Kelurahan, 140 Orang	-	148 Desa / Kelurahan, 140 Orang	148 Desa / Kelurahan, 140 Orang	1,00	530 Orang, 148 Desa/Kelurahan	530 Orang, 148 Desa/Kelurahan	1,00
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial	9 Karang Taruna, 9 PSM dan 9 TKSK	-	9 Karang Taruna, 9 PSM dan 9 TKSK	9 Karang Taruna, 9 PSM dan 9 TKSK	1,00	18 Karang Taruna, 9 PSM, 9 TKSK	18 Karang Taruna, 9 PSM, 9 TKSK	1,00
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah model kelembagaan perlindungan jaminan sosial dan bantuan sosial	1 Lembaga	-	1 Lembaga	1 Lembaga	1,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat bantuan, Jumlah peran aktif masyarakat dan dunia usaha	14 Panti Asuhan / 250 Orang / 2 Karang Taruna	-	14 Panti Asuhan / 250 Orang / 2 Karang Taruna	14 Panti Asuhan / 250 Orang / 2 Karang Taruna	3,00	17 Panti Asuhan, 2 Lembaga, 18 Karang Taruna	17 Panti Asuhan, 2 Lembaga, 18 Karang Taruna	1,00
1 06 03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			-						
1 06 03 2.01	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	15,4 %	-	15,4 %	15,4 %				
1 06 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial hukum berupa sosialisasi	550 Orang	-	550 Orang	550 Orang	1,00			
1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial			-				45.30 %	45.30 %	1,00
1 06 04 2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan , persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang tertangani	14,5 %	-	14,5 %	14,5 %		15.4 %	15.4 %	1,00
1 06 04 2 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia di luar panti yang mendapat pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	820 Orang	-	820 Orang	820 Orang	1,00	350 Orang	350 Orang	1,00
1 06 04 2 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma	530 Orang	-	530 Orang	530 Orang	1,00	158 Orang	158 Orang	1,00
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah anak nakal yang mendapat pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja	20 Orang / 900 Anak /1 Dokumen	-	20 Orang / 800 Anak / 1 Dokumen	20 Orang / 800 Anak / 1 Dokumen	3,00	1 Dokumen, 300 Anak	1 Dokumen, 300 Anak	1,00
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah pelatihan bagi para penyandang disabilitas dan bantuan sosial	50 Orang	-	50 Orang	50 Orang	1,00	550 Orang	550 Orang	1,00
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan , persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang tertangani	19,5 %	-	19,5 %	19,5 %		19.5 %	19.5 %	1,00
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah eks napi yang mendapat pelatihan keterampilan	30 Orang	-	30 Orang	30 Orang	1,00	1 Lembaga, 130 Orang	1 Lembaga, 130 Orang	1,00
1 06 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	1000 Orang / Masyarakat	-	1000 Orang / Masyarakat	1000 Orang / Masyarakat	1,00	300 Orang	300 Orang	1,00
1 06 04 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	150 Orang	-	150 Orang	150 Orang	1,00	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
1 06 05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial			-				84 %	84 %	1,00
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	84 %	-	84 %	84 %		84 %	84 %	1,00
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemutakhiran data penduduk miskin	148 Desa / Kelurahan	-	148 Desa / Kelurahan	148 Desa / Kelurahan	1,00	148 Desa/Kelurahan	148 Desa/Kelurahan	1,00
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah model kelembagaan perlindungan jaminan sosial dan bantuan sosial	Kabupaten Buleleng	-				1 Lembaga	1 Lembaga	1,00
1 06 06	Program Penanganan Bencana			-				84 %	84 %	1,00
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	84 %	-	84 %	84 %		84 %	84 %	1,00
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat, kejadian luar biasa dan bantuan sosial yang tidak direncanakan	500 KK / 10 Orang	-	500 KK / 10 Orang	500 KK / 10 Orang	2,00	10 Orang, 450 KK	10 Orang, 450 KK	1,00
1 06 06 2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	84 %	-	-	-				
1 06 06 2 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah masyarakat yang memahami kebencanaan	60 Orang	-	-	-				
1 06 07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			-				18 %	18 %	1,00
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelestarian TMP/Monumen dan nilai kepahlawanan	18 %	-	18 %	18 %		18 %	18 %	1,00
1 06 07 2.01 01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah pemahaman tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	400 Orang / 5 Kegiatan	-	400 Orang / 5 Kegiatan	400 Orang / 5 Kegiatan	2,00	4 Kegiatan, 400 Orang	4 Kegiatan, 400 Orang	1,00
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	5 Monumen / Tugu Perjuangan	-	5 Monumen / Tugu Perjuangan	5 Monumen / Tugu Perjuangan	1,00	5 Monumen	5 Monumen	1,00
1 06 07 2.01 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan dan monumen tugu perjuangan	5 Monumen	-	5 Monumen	5 Monumen	1,00	5 Monumen	5 Monumen	1,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pada dasarnya kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 6 Program, 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Dari ke 6 program tersebut, 5 program, 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan menjadi program utama serta 1 program, 5 kegiatan dan 14 sub kegiatan menjadi program penunjang yang menjadi pendukung kegiatan. Pada umumnya program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan secara optimal atau berhasil dengan baik. Ini terbukti dari perhitungan Pengukuran Kinerja Kegiatan dapat dilihat bahwa ada 29 sub kegiatan tingkat capaian target keluaran mencapai 100% dan 1 kegiatan tidak mencapai 100% bila dilihat dari perhitungan anggaran pada tiap-tiap kegiatan, namun secara fisik pada program utama tingkat capaian keluaran rata-rata telah mencapai 81,25% s/d 100%. Begitu juga terhadap Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) tingkat capaiannya rata-rata realisasi keuangan antara 93,25% - 100% atau capaian rata-rata realisasi keuangan 97,96%.

Dari Indikator Kinerja yang telah ditentukan dalam Stándar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial maka dapat disampaikan hasil pencapaian sasaran pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan anggaran APBD Kabupaten Tahun 2021 yaitu:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Kota		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	<p>Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti</p> <p>Indikator : Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti</p>	2021	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	<p>Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti</p> <p>Indikator : Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti</p>	2021	100	100	100

3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	<p>Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti</p> <p>Indikator : Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti</p>	2021	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	<p>Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis di luar panti</p> <p>Indikator : Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti</p>	2021	100	100	100
5	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	<p>Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana dan sosial daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Indikator : Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</p>	2021	100	100	100

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

No	Indikator	SPM / Standar	IKK	Target Renstra Dinas Sosial				Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	44%	100%	
2	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	40%	100%	
3	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	50%	100%	
4	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	43%	100%	
5	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100%	100%	450 KK	450 KK	450 KK	450 KK	17%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sistem, Prosedur dan mekanisme kerja dari pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Sosial. Sedangkan dari segi teknis, fungsi yang diselenggarakan mencakup: Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati; Pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya permasalahan sosial; Pelaksanaan rehabilitasi penyandang permasalahan sosial; Pemberian pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial; Pemberian perijinan di bidang sosial sesuai dengan kewenangan dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dinas sosial Kabupaten Buleleng, telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan baik yang menyangkut pelayanan sosial, pemberdayaan lembaga sosial maupun pembinaan karang taruna dan petugas sosial lainnya serta yang berkaitan dengan penataan dan pelestarian monumen serta penghayatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan.

Program yang dilaksanakan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta mengurangi timbulnya masalah sosial baru. Program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya penanganan Isu Strategis yaitu penanggulangan kemiskinan, penanggulangan penyandang cacat, penanggulangan keterlantaran, penanganan ketunaan sosial, penanggulangan bencana alam/sosial termasuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan. Program dan kegiatan tersebut akan menjawab terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Buleleng terhadap program-program unggulan nasional sebagaimana dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam penanggulangan kemiskinan.

Kondisi PMKS di Kabupaten Buleleng cenderung mengalami penurunan, namun di beberapa kategori mengalami kenaikan. Hal ini diakibatkan karena kompleksnya masalah sosial sehingga perlu penanganan yang terpadu. Berbagai kebijakan dan program serta kegiatan terus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud, seperti meningkatkan kemampuan PMKS, Organisasi Sosial/Panti Sosial dan memulihkan kehidupan sosial ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Secara umum capaian kinerja Dinas Sosial telah dapat mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pola penanganan yang dikembangkan tersebut dapat berupa Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bantuan Perbaikan Gizi (sembako) bagi anak terlantar/anak balita terlantar, lanjut usia terlantar, keluarga miskin, penyandang disabilitas, wanita rawan sosial ekonomi, anak nakal, maupun pembinaan terhadap panti sosial/orsos guna meningkatkan kapasitas maupun kualitas kehidupannya. Sedangkan untuk penanganan kepada eks para korban diberikan advokasi, bimbingan, motivasi sosial dan keterampilan praktis sesuai dengan potensi keterampilan dasar yang dimiliki serta potensi daerah masing-masing seperti beternak babi/kambing/sapi dan yang lainnya.

Terhadap beberapa kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami kenaikan seperti bertambahnya kasus Penyandang HIV/AIDS dan bahkan penyebarannya sampai keseluruhan wilayah kecamatan. Hal ini diakibatkan karena kondisi dan perkembangan globalisasi yang disalahgunakan. Namun demikian semua bentuk permasalahan sosial tersebut di atas, telah diupayakan penanganannya secara bertahap, terpadu dan berkesinambungan dengan SKPD/ Lembaga terkait.

Tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Sosial antara lain:

- a. Jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat kemiskinan yang juga cukup tinggi dengan sebaran yang begitu luas merupakan tantangan dalam upaya penanggulangan/pengentasannya.
- b. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan utamanya peningkatan akibat migrasi dari Luar Bali (Jatim) tidak dapat dipungkiri akan memunculkan kerawanan sosial;
- c. Penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial (Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan lain lain) merupakan tantangan dalam upaya meningkatkan kapasitasnya sehingga mereka bisa berdaya dan mandiri dalam menjalani kehidupannya;
- d. Rentannya wilayah Buleleng terhadap Bencana Alam dan bahkan setiap tahun sering terjadi di beberapa wilayah kecamatan, hal ini menjadi tantangan dalam upaya penanganan masalah sosial akibat bencana dimaksud.
- e. Belum dimilikinya rumah singgah yang dipergunakan untuk menampung para tuna sosial (WTS, Gepeng, orang terlantar luar daerah dan penyelamatan korban eksploitasi anak dan perempuan).
- f. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Buleleng maka permasalahan kesejahteraan sosial tidak akan dapat ditanggulangi dalam waktu singkat.

Walaupun masalah sosial tidak dapat di hentikan ataupun di stop karena sifatnya yang dinamis sejalan dengan dinamika kehidupan manusia, namun Dinas Sosial Kabupaten Buleleng senantiasa mengupayakan penanganan maupun pengelolaan sehingga masalah sosial ataupun kerawanan sosial di Kabupaten Buleleng dapat di eliminir sejalan dengan tupoksi yang diembannya dengan mengoptimalkan peluang yang ada dilingkungan eksternalnya. Adapun peluang dimaksud adalah:

- a. Adanya jalinan koordinasi yang kooperatif dari berbagai SKPD terkait dalam penanganan masalah sosial.
- b. Partisipasi lembaga sosial/organisasi sosial dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial;
- c. Adanya pedoman ataupun kebijakan yang menjadi pegangan dalam penanganan masalah sosial, sehingga penanganannya menjadi lebih jelas terarah dan dapat dipertanggungjawabkan
- d. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah, baik dari APBD Kabupaten Buleleng, APBD Provinsi Bali maupun APBN.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2005 - 2025 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial yaitu : *"Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana"*. Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 - 2026 apabila dibandingkan dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Sosial telah terdapat kesesuaian yang secara keseluruhan di tuangkan dan diuraikan dalam Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Sebagaimana disampaikan dalam Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2023 Kabupaten Buleleng

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial

Lembar..... Dari.....

Rancangan Awal RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
No		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	06					11.168.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				11.168.000.000	
1	06	01				6.279.664.221	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100 %	6.279.664.221	
1	06	01	2.01			251.866.964	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	100 %	251.866.964	
1	06	01	2.01	01		114.440.339	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	14 Dokumen	114.440.339	
1	06	01	2.01	07		137.426.625	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Laporan	137.426.625	
1	06	01	2.02			4.767.092.984	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	4.767.092.984	
1	06	01	2.02	01		4.131.069.480	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	29 Orang	4.131.069.480	
1	06	01	2.02	02		361.606.818	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi tugas asn	12 Dokumen	361.606.818	
1	06	01	2.02	03		274.416.686	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	12 Dokumen	274.416.686	
1	06	01	2.06			317.366.312	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	317.366.312	
1	06	01	2.06	01		24.641.667	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	24.641.667	
1	06	01	2.06	02		72.150.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	72.150.000	
1	06	01	2.06	04		164.188.425	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	164.188.425	
1	06	01	2.06	05		31.748.220	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	31.748.220	
1	06	01	2.06	09		24.638.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	12 Laporan	24.638.000	
1	06	01	2.08			833.738.561	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	833.738.561	
1	06	01	2.08	01		75.754.831	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	75.754.831	
1	06	01	2.08	02		241.828.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	241.828.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1 06 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	276.116.200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	276.116.200	
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	240.039.530	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	240.039.530	
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	109.599.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	109.599.400	
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perijinannya.	12 Unit	51.280.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perijinannya.	12 Unit	51.280.000	
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Unit	52.569.600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Unit	52.569.600	
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	5.749.800	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	5.749.800	
1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial	Kabupaten Buleleng	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	80%	1.460.188.130	Program Pemberdayaan Sosial	Kabupaten Buleleng	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	80%	1.460.188.130	
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	80%	1.460.188.130	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	80%	1.460.188.130	
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	148 Orang	157.853.560	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	148 Orang	157.853.560	
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	9 Orang	114.667.853	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	9 Orang	114.667.853	
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	100 Keluarga	109.950.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	100 Keluarga	109.950.000	
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	7 Lembaga, 17 LKS	1.077.716.717	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	7 Lembaga, 17 LKS	1.077.716.717	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	6,86%	1.269.884.437	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	6,86%	1.269.884.437	
1 06 04 2,01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	1,5%	1.040.873.867	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	1,5%	1.040.873.867	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)		
1	06	04	2,01	01	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	400 Orang	374.675.896	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	400 Orang	374.675.896	
1	06	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang yang mendapat alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	30 Orang	109.388.593	Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang yang mendapat alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	30 Orang	109.388.593	
1	06	04	2,01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	100 Orang	85.538.027	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	100 Orang	85.538.027	
1	06	04	2,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Buleleng	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	100 Orang	105.330.149	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Buleleng	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	100 Orang	105.330.149	
1	06	04	2,01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Buleleng	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	400 Orang	365.941.202	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Buleleng	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	400 Orang	365.941.202	
1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kabupaten Buleleng	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani	1,5%	229.010.570	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kabupaten Buleleng	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani	1,5%	229.010.570	
1	06	04	2,02	02	Pemberian layanan kedaruratan	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	15 Orang	49.070.481	Pemberian layanan kedaruratan	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	15 Orang	49.070.481	
1	06	04	2,02	03	Penyediaan permakanan	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	200 Orang	83.636.708	Penyediaan permakanan	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	200 Orang	83.636.708	
1	06	04	2,02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Buleleng	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	100 Orang	96.303.381	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Buleleng	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	100 Orang	96.303.381	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	595.320.838	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	595.320.838	
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100%	595.320.838	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100%	595.320.838	
1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	4000 Orang	311.168.393	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	4000 Orang	311.168.393	
1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Buleleng	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	500 Keluarga	284.152.445	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Buleleng	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	500 Keluarga	284.152.445	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	277.647.353	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	277.647.353	
1 06 06 2,01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100%	277.647.353	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100%	277.647.353	
1 06 06 2,01 04	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	450 Orang	277.647.353	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	450 Orang	277.647.353	
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Cakupan Perlindungan Terhadap Nilai Kepahlawanan	100%	1.285.295.021	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Cakupan Perlindungan Terhadap Nilai Kepahlawanan	100%	1.285.295.021	
1 06 07 2,01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase peningkatan pelestarian TMP / Monumen dan nilai kepahlawanan	100%	1.285.295.021	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase peningkatan pelestarian TMP / Monumen dan nilai kepahlawanan	100%	1.285.295.021	
1 06 07 2,01 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	449.086.445	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	449.086.445	
1 06 07 2,01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Makam	756.826.654	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Makam	756.826.654	
1 06 07 2,01 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan hasil pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	79.381.922	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan hasil pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	79.381.922	

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan untuk tahun anggaran 2023 diambil dari usulan masyarakat melalui Musrenbang tahun anggaran 2022 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mengakomodir usulan musrenbang dari masyarakat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Buleleng

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No (1)	Program/Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Besaran / Volume (5)	Catatan (6)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	100 %	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	14 Dokumen	
02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Laporan	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	29 Orang	
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen hasil penyediaan adminitrasi tugas asn	12 Dokumen	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	12 Dokumen	
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	
03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	
04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	
05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	12 Laporan	
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya.	12 Unit	
02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Unit	
03	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	
II	Program Pemberdayaan Sosial	Kabupaten Buleleng	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	80%	
a.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	80%	
01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	148 Orang	
02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	9 Orang	
03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	100 Keluarga	
04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	7 Lembaga, 17 LKS	
IV	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	6,86%	
a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	1,5%	
01	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	400 Orang	
02	Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang yang mendapat alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	30 Orang	
03	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	100 Orang	
04	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Buleleng	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	100 Orang	
05	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Buleleng	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	400 Orang	

No (1)	Program/Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Besaran / Volume (5)	Catatan (6)
b.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kabupaten Buleleng	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani	1,5%	
01	Pemberian layanan kedaruratan	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	15 Orang	
02	Penyediaan permakanaan	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	200 Orang	
03	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Buleleng	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	100 Orang	
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	
a.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100%	
01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	4000 Orang	
02	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Buleleng	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	500 Keluarga	
VI	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	
a.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100%	
01	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Kabupaten Buleleng	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	450 Orang	
VII	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Cakupan Perlindungan Terhadap Nilai Kepahlawanan	100%	
a.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase peningkatan pelestarian TMP / Monumen dan nilai kepahlawanan	100%	
01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Makam	
03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan hasil pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup manusia, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksud meliputi Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial. Dari keseluruhan penyelenggaraan sosial tersebut strategi pembangunan yang dikembangkan untuk tercapainya perwujudan tujuan dan sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pendeteksian, pencegahan timbulnya masalah sosial
- b. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam penanggulangan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- c. Melaksanakan inventarisasi, pendataan dan pemetaan kerawanan sosial dalam upaya mendukung pendeteksian, pencegahan dan mitigasi timbulnya masalah sosial
- d. Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah sosial
- e. Meningkatkan pemberdayaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial.
- f. Meningkatkan pengkajian dan pendataan nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan;
- g. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung operasional pelayanan penanganan masalah sosial
- h. Meningkatkan profesionalisme dan kemandirian SDM dalam mendukung kinerja penanganan masalah sosial

Program Nasional yang menjadi prioritas terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yaitu dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan antara lain kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

- Tujuan Renja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu :
 - a). Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang terpadu, baik intern maupun ekstern lembaga;
 - b). Mengetahui secara dini dan munculnya kerawanan sosial;
 - c). Mencegah terhadap munculnya kerawanan sosial;
 - d). Mengidentifikasi dan menginventarisasi kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
 - e). Pemetaan lokasi kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
 - f). Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - h). Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi karang taruna dan pekerja sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya ;
 - i). Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan.

- Sasaran yang ingin dicapai adalah:
 - a). Meningkatnya koordinasi dan kerjasama yang semakin mantap dalam penanggulangan masalah sosial;
 - b). Diketuainya/terdeteksinya secara dini terhadap munculnya kerawanan sosial;
 - c). Dapat dicegahnya terhadap munculnya kerawanan sosial;
 - d). Teridentifikasinya dan terinventarisasinya kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
 - e). Terpetakannya lokasi dan jenis kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
 - f). Meningkatnya aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan:

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk strategi pencapaian sasaran, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Sosial

- a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Program Rehabilitasi Sosial

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Layanan Kedaruratan
 - Penyediaan Permakanan
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

4. Program Penanganan Bencana

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Dari 5 program yang menjadi program wajib, 6 kegiatan serta 15 sub kegiatan, terdapat pula 1 program dan 5 kegiatan serta 14 sub kegiatan yang merupakan program penunjang. Penyebaran program dan kegiatan dialokasikan pada usulan hasil Musrenbang baik tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kabupaten yang menjadi program prioritas dari tiap-tiap Desa/Kelurahan serta desa yang menjadi lokasi program Pengentasan Kemiskinan.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan sebagai berikut:

TABEL T-C.33.

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Buleleng
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Lembar dari

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
(1)						(2)	(3)	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				11.168.000.000				10.071.000.000
1	06	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		100 %	6.279.664.221	APBD II		100 %	5.710.000.000
1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	251.866.964	APBD II		100 %	220.000.000
1	06	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	14 Dokumen	114.440.339	APBD II		14 Dokumen	90.000.000
1	06	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	8 Laporan	137.426.625	APBD II		8 Laporan	130.000.000
1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	4.767.092.984	APBD II		100 %	4.520.000.000
1	06	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	29 Orang	4.131.069.480	APBD II		29 Orang	3.955.000.000
1	06	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan adminitrasi tugas asn	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Dokumen	361.606.818	APBD II		12 Dokumen	349.000.000
1	06	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Dokumen	274.416.686	APBD II		12 Dokumen	216.000.000
1	06	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	317.366.312	APBD II		100 %	102.000.000
1	06	01	2,06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Paket	24.641.667	APBD II		12 Paket	15.000.000
1	06	01	2,06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	1 Paket	72.150.000	APBD II		-	-
1	06	01	2,06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	2 Paket	164.188.425	APBD II		2 Paket	57.000.000
1	06	01	2,06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	2 Paket	31.748.220	APBD II		2 Paket	15.000.000
1	06	01	2,06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	24.638.000	APBD II		12 Laporan	15.000.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	833.738.561	APBD II		100 %	781.000.000
1	06	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	75.754.831	APBD II		12 Laporan	70.000.000
1	06	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	241.828.000	APBD II		12 Laporan	211.000.000
1	06	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	276.116.200	APBD II		12 Laporan	230.000.000
1	06	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	240.039.530	APBD II		12 Laporan	270.000.000
1	06	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	109.599.400	APBD II		100 %	87.000.000
1	06	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perijinannya.	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Unit	51.280.000	APBD II		12 Unit	52.000.000
1	06	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	1 Unit	52.569.600	APBD II		1 Unit	30.000.000
1	06	01	2.09	09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	1 Unit	5.749.800	APBD II		1 Unit	5.000.000
1	06	02		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Kabupaten Buleleng	80%	1.460.188.130	APBD II		80%	1.300.000.000
1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kabupaten Buleleng	80%	1.460.188.130	APBD II		80%	1.300.000.000
1	06	02	2.03	01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Buleleng	148 Orang	157.853.560	APBD II		148 Orang	200.000.000
1	06	02	2.03	02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Buleleng	9 Orang	114.667.853	APBD II		9 Orang	114.660.000
1	06	02	2.03	03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Buleleng	100 Keluarga	109.950.000	APBD II		100 Keluarga	80.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Buleleng	7 Lembaga, 17 LKS	1.077.716.717	APBD II		6 Lembaga, 17 LKS	905.340.000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		6,86%	1.269.884.437	APBD II		9,86%	1.250.000.000
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	Kabupaten Buleleng	1,5%	1.040.873.867	APBD II		1,5%	860.000.000
1	06	04	2,01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Buleleng	400 Orang	374.675.896	APBD II		400 Orang	250.000.000
1	06	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapat alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Buleleng	30 Orang	109.388.593	APBD II		30 Orang	120.000.000
1	06	04	2,01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Buleleng	100 Orang	85.538.027	APBD II		100 Orang	110.000.000
1	06	04	2,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Buleleng	100 Orang	105.330.149	APBD II		100 Orang	120.000.000
1	06	04	2,01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Buleleng	400 Orang	365.941.202	APBD II		400 Orang	260.000.000
1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani	Kabupaten Buleleng	1,5%	229.010.570	APBD II		1,5%	390.000.000
1	06	04	2,02	02	Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Buleleng	15 Orang	49.070.481	APBD II		15 Orang	50.000.000
1	06	04	2,02	03	Penyediaan permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Buleleng	200 Orang	83.636.708	APBD II		200 Orang	100.000.000
1	06	04	2,02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Buleleng	100 Orang	96.303.381	APBD II		100 Orang	240.000.000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		100%	595.320.838	APBD II		100%	350.000.000
1	06	05	2,02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Kabupaten Buleleng	100%	595.320.838	APBD II		100%	350.000.000
1	06	05	2,02	01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Kabupaten Buleleng	4000 Orang	311.168.393	APBD II		4000 Orang	162.000.000
1	06	05	2,02	03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Buleleng	500 Keluarga	284.152.445	APBD II		500 Keluarga	188.000.000
1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100%	277.647.353	APBD II		100%	275.000.000
1	06	06	2,01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Kabupaten Buleleng	100%	277.647.353	APBD II		100%	275.000.000
1	06	06	2,01	04 Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Buleleng	450 Orang	277.647.353	APBD II		450 Orang	275.000.000
1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Perlindungan Terhadap Nilai Kepahlawanan		100%	1.285.295.021	APBD II		100%	1.186.000.000
1	06	07	2,01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelestarian TMP / Monumen dan nilai kepahlawanan	Kabupaten Buleleng	100%	1.285.295.021	APBD II		100%	1.186.000.000
1	06	07	2,01	01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	1 Dokumen	449.086.445	APBD II		1 Dokumen	350.000.000
1	06	07	2,01	02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	1 Makam	756.826.654	APBD II		1 Makam	730.000.000
1	06	07	2,01	03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	1 Laporan	79.381.922	APBD II		1 Laporan	106.000.000

BAB IV

P E N U T U P

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa ada dukungan dan partisipasi dari seluruh Komponen masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha sebagai mitra kerja, untuk itulah dituntut koordinasi dan kerjasama yang komunikatif dan berkelanjutan sehingga Pembangunan manusia khususnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial dapat terwujud dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan yaitu tercapainya masyarakat yang Mandiri, Sejahtera lahir dan batin berdasarkan konsep hidup Tri Hita Karana.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 2023 ini disusun disamping berdasarkan analisis lingkungan strategis Bappeda juga mempedomani ataupun berdasarkan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025. Renja ini substansinya memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang nantinya menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam 1 (satu) tahun.

Renja ini juga menjadi pedoman/acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Buleleng serta dalam penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Untuk dapat berhasilnya pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam tahun 2023, maka dipandang perlu menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Bagian/Bidang yang ada didalam jajaran kelembagaan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sehingga dapat mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan;
2. Perlu adanya konsistensi dan sinergi antar bidang dalam perencanaan pembangunan, sehingga dalam implementasinya terpadu dan terintegrasi;
3. Perlu adanya dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Buleleng dan *stakeholders* lainnya untuk mendukung pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sehingga dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng serta sasaran Pembangunan Kabupaten Buleleng dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah dari Dinas Sosial Tahun 2023 ini disusun semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat untuk kita semua khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).